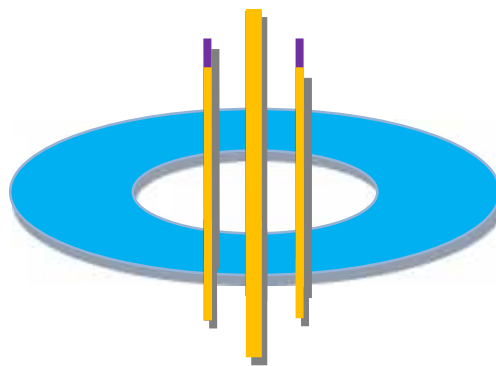


LAKIP

**(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN)**

TAHUN 2015



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
2016**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan Media Pertanggung Jawaban yang berisi informasi kinerja instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 ini diharapkan pelaksanaan teknis program dan kegiatan yang akan datang dapat lebih terencana dan tertata sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi serta penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan bagi segenap pemangku kepentingan, dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kami mengucapkan terima kasih.

Pangkalan Bun, Januari 2016
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Kotawaringin Barat

Drs. WAHYUDI, M. Si
Nip. 19630923 199003 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai unsur staf teknis berkedudukan dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah, penelitian dan pengembangan Kabupaten, penataan ruang, perencanaan penanaman modal, statistik kabupaten serta penilaian atas pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi perencanaan pembangunan di daerah
2. Penelitian dan kajian perencanaan semua bidang pembangunan
3. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
4. Penetapan perencanaan pembangunan daerah secara terpadu
5. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
7. Sinkronisasi perencanaan bidang-bidang pembangunan di daerah
8. Statistik, Penelitian dan Pengembangan.
9. Penataan ruang.
10. Kebijakan pengembangan penanaman modal.
11. Pengendalian serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.

C. Aspek Strategis

Adapun maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2015 adalah untuk meningkatkan Kinerja Bappeda yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Instansi Bappeda, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2015 adalah untuk menggambarkan telah dilaksanakannya program kerja dan anggaran Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 sebagai penjabaran hasil program kerja setiap satuan kerja, sehubungan hal tersebut maka wajib bagi Bappeda menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015.

Pada Tahun 2015 Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat mengangkat isu-isu strategis SKPD BAPPEDA yang ada yaitu:

1. Optimalnya peran dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM, RKPD.
2. Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah belum optimal.
3. Dokumen tata ruang belum sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
4. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
5. Belum maksimalnya koordinasi lintas sektoral antar pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Nasional.
6. Belum optimalnya koordinasi perencanaan penanaman modal.

D. Struktur Organisasi

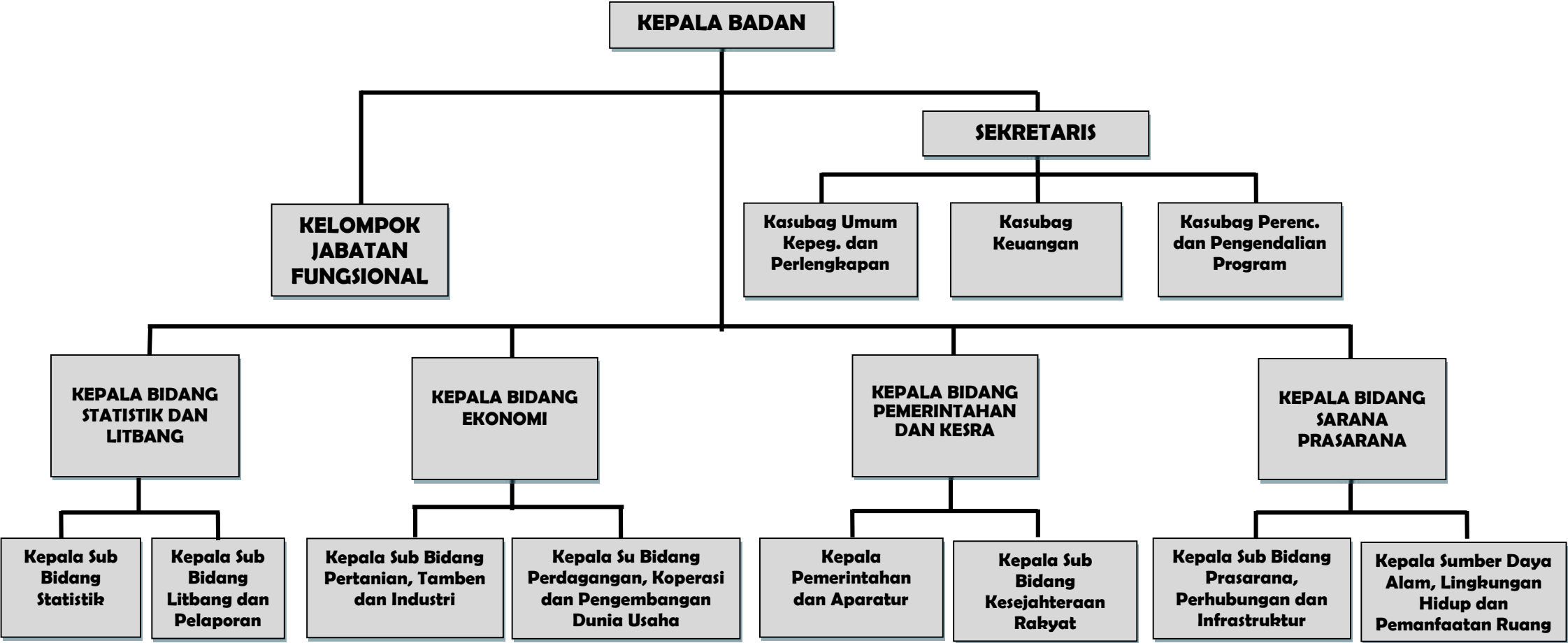
Organisasi dan Tata Kerja Bappeda telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan membawahi 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 8 Kepala Sub Bidang dan 3 Kepala Sub Bagian. Struktur organisasi Bappeda

tersebut dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Secara rinci sebagai berikut:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Sekretaris membawahi 3 Kepala Sub Bagian meliputi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian & Perlengkapan;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan & Pengendalian Program.
3. Kepala Bidang Statistik dan Litbang membawahi 2 Kepala Sub Bidang :
 - a. Kepala Sub Bidang Statistik;
 - b. Kepala Sub Bidang Litbang & Pelaporan;
4. Kepala Bidang Ekonomi membawahi 2 Kepala Sub Bidang :
 - a. Kepala Sub Bidang Pertanian, Pertambangan, Energi & Industri;
 - b. Kepala Sub Bidang Perdagangan, Koperasi & Pengembangan Dunia Usaha;
5. Kepala Bidang Pemerintahan & Kesra membawahi 2 Kepala Sub Bidang
 - a. Kepala Sub Bidang Pemerintahan & Aparatur
 - b. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
6. Kepala Bidang Sarana & Prasarana membawahi 2 Kepala Sub Bidang :
 - a. Kepala Sub Bidang Prasarana, Perhubungan & Infrastruktur;
 - b. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup & Pemanfaatan Ruang

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi sebagai berikut :



E. Kepegawaian

Sampai dengan per 31 Desember Tahun 2015, tercatat pegawai negeri sipil sebanyak 37 orang, dengan rincian sebagaimana terlampir di bawah ini :

a. Data Pegawai Negeri Sipil menurut pendidikan :

No.	Uraian	Akhir tahun 2015
1.	S2	3
2.	S1	23
3.	Sarjana Muda	4
4.	SLTA	7
5.	SLTP	-
6.	SD	-
	Jumlah	37

b. Data Pegawai Negeri Sipil menurut pangkat dan golongan :

No	Uraian	Akhir Tahun 2015
1.	Juru Muda (I/a) Juru Muda Tk. I (I/b) Juru(I/c) Juru Tk. I(I/d)	- - - -
	Jumlah Gol I	-
2.	Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda Tk.I (II/b) Pengatur (II/c) Pengatur Tk. I (IId)	- 1 3 -
	Jumlah Gol II	4
3.	Penata Muda (III/a) Penata Muda Tk.I (III/b) Penata (III/c) Penata Tk.I (III/d)	4 15 1 7
	Jumlah Gol III	27
4.	Pembina (IV/a) Pembina Tingkat I (IV/b) Pembina Utama Muda (IV/c)	3 2 1
	Jumlah Gol IV	6

c. Data Pegawai Negeri Sipil menurut eselon :

No	Uraian	Akhir Tahun 2015
1.	Eselon I	-
2.	Eselon IIb	1
3.	Eselon IIIa	1
4.	Eselon IIIb	4
5.	Eselon IVa	11
6.	Fungsional	-
7.	Staf	20
	Jumlah	37

d. Data pegawai tidak tetap (honorar) :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pegawai Tidak Tetap	8
	Total	8

F. Sarana dan Prasarana

Kondisi Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan akhir tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : Kondisi Sarana dan Prasarana

Nama barang	Jumlah		Harga	Keterangan
	Volume	Satuan		
Tanah kantor Bappeda	10.000	M2	400.000.000,00	
Alat-alat angkutan			793.180.000,00	
Minibus	2	Buah	480.840.000,00	Baik
Sepeda motor	24	Buah	312.340.000,00	Baik
Alat Bengkel dan Alat Ukur			14.000.000,00	
Global Positioning System (GPS)	1	Buah	14.000.000,00	Baik
Alat Kantor dan Rumah Tangga			1.607.747.800,00	
Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1	Buah	3.270.000,00	
Lemari Besi	21	Buah	16.025.000,00	
Rak Besi/Metal	1	Buah	24.970.000,00	
Rak Kayu	15	Buah	30.200.000,00	
Filling Besi/Metal	15	Buah	14.361.000,00	
Brand Kas	1	Buah	1.000.000,00	
Lemari Kaca	3	Buah	7.100.000,00	
Lemari kayu	1	Buah	475.000,00	
Alat Penghancur Kertas	1	Unit	3.965.000,00	

Papan Pengumuman	2	Buah	3.500.000,00	
Meja Rapat	51	Buah	159.300.000,00	
Meja Telp	1	Buah	50.000,00	
Meja Panjang	5	Buah	3.750.000,00	
Kursi Rapat	250	Buah	114.545.000,00	
Kursi Tamu	2	Buah	8.000.000,00	
Kursi Lipat	50	Buah	21.475.000,00	
Meja Komputer	9	Buah	1.125.000,00	
Meja Biro	25	Buah	36.030.000,00	
Sofa	5	Buah	30.020.000,00	
Kursi Kerja	20	Buah	19.965.000,00	
Gordyn	3	Buah	69.830.000,00	
Rak TV	1	Buah	1.000.000,00	
Karpet	3	Buah	500.000,00	
Taplak Meja	1	Buah	9.900.000,00	
Mesin Potong Rumput	2	Buah	5.500.000,00	
Lemari Es	2	Buah	2.206.800,00	
AC Unit	23	Buah	167.861.000,00	
AC Split	5	Buah	99.150.000,00	
Kipas Angin	6	Buah	2.205.750,00	
Dispenser	1	Buah	1.700.000,00	
Kompor Gas	1	Unit	500.000,00	
Rak Piring	2	Buah	1.454.000,00	
Televisi	3	Unit	7.835.000,00	
Wireless	1	Unit	1.000.000,00	
Mic Conference	1	Unit	11.985.000,00	
Lambang Garuda Pancasila	1	Buah	10.000,00	
Tangga Aluminium	2	Buah	7.150.000,00	
Kaca Hias	1	Buah	45.000,00	
Tiang Bendera	10	Buah	2.000.000,00	
Mimbar/Podium	1	Buah	1.850.000,00	
Alat Rumah Tangga Lain-lain	6	Buah	2.700.000,00	
Tandon Air	1	Unit	5.450.000,00	
Mainframe	3	Unit	123.540.000,00	
P.C Unit/ Komputer PC	17	Unit	168.800.000,00	
Note Book	13	Unit	126.140.000,00	
Plotter	1	Unit	74.000.000,00	
Monitor	1	Unit	1.925.000,00	
Printer	17	Unit	42.007.000,00	
UPS	2	Unit	58.500.000,00	
Stabilizer/Stavolt	1	Unit	1.500.000,00	
Router	1	Unit	9.900.000,00	
Hub	1	Unit	990.000,00	
Modem	2	Unit	5.000.000,00	
Peralatan Jaringan Lain-lain	8	Unit	4.299.000,00	
Harddisk Eksternal	2	Buah	4.550.000,00	

Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	1.000.000,00	
Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Buah	3.687.500,00	
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Buah	2.475.000,00	
Meja Kerja	7	Buah	5.775.000,00	
Meja Rapat Pejabat Lain-lain	2	Buah	5.800.000,00	
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	10	Buah	28.950.000,00	
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	Buah	18.700.000,00	
Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	13	Buah	1.625.000,00	
Lemari Buku untuk Perpustakaan	1	Buah	2.100.000,00	
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	5	Buah	15.125.000,00	
Alat Studio dan Alat Komunikasi			236.485.000,00	
Proyektor + Attachment	5	Unit	103.810.000,00	
Digital Audio Tape Recorder	1	Unit	1.755.000,00	
Peralatan studio Visual Lain-lain	1	Unit	150.000,00	
Layar Proyektor	1	Unit	14.410.000,00	
Camera Elektronik	1	Unit	11.800.000,00	
Amplifier	1	Unit	4.950.000,00	
Sound System	3	Unit	65.560.000,00	
Telephone (PABX)	1	Unit	14.780.000,00	
Facsimile	1	Unit	5.000.000,00	
Wireless Amplifier	2	Unit	14.270.000,00	
Gedung dan Bangunan Gedung			2.987.849.950,00	
Bangunan Gedung Kantor Permanen	728	M ²	1.572.756.150,00	
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	96	M ²	179.100.000,00	
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	72	M ²	44.100.000,00	
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen			994.844.800,00	
Bangunan Kamar Mandi	42	M ²	9.900.000,00	
Pintu Pagar			29.350.000,00	
Pintu Gerbang			91.699.000,00	
Rumah Negara Gol I Lain-lain	16	M ²	66.100.000,00	
Aset Tidak Berwujud			4.712.383.000,00	
Perangkat Lunak Sistem Operasi	7	Unit	479.112.500,00	
Hasil Kajian (DED) / Penelitian	28	Buah	4.233.270.500,00	

G. Sistematika Penulisan

- Bab I **Pendahuluan**, menguraikan dasar hukum, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sistematika penulisan;
- Bab II **Perencanaan & Perjanjian Kinerja**, memuat uraian singkat tentang rencana strategis, visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan ;
- Bab III **Akuntabilitas Kinerja**, memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja serta akuntabilitas keuangan (alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi) ;
- Bab IV **Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan pemecahan masalah yang akan dilaksanakan.

Lampiran-lampiran

Lampiran I Rencana Kinerja Tahunan

Lampiran II Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat. Visi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu :

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas”

Pernyataan visi di atas dimaksudkan untuk menjadikan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai lembaga yang profesional dalam merespon aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan perubahan global dalam menghasilkan suatu perencanaan daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif, berkualitas, sinergis dan terintegrasi untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat yang maju dan sejahtera.

Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas,

mengandung pengertian bahwa sebagai suatu lembaga perencanaan, produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda harus dapat menjadi alternatif solusi terbaik dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan daerah dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria dalam kerangka mencapai visi tersebut diatas dengan kriteria sebagai berikut :

a. **Berbasis Kondisi Lokal;**

Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal yang bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Perencanaan pembangunan daerah diharapkan mengakomodir terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat.

b. **Mendukung Perencanaan Pembangunan Nasional;**

Harus ada sinergi antara pusat dan daerah terhadap kerangka dan arah perencanaan pembangunan, guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

c. Mengakomodir Perubahan Global;

Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka pikir global yang bertindak untuk kepentingan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan daerah dan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi.

Guna mewujudkan visi Bappeda 2012 – 2016 di atas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Misi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016 adalah :

- **Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Bappeda**
- **Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah**
- **Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Daerah yang Berkualitas**

Misi Pertama, merupakan pernyataan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat yang Profesional, aspiratif, partisipatif dan akuntabel.

Misi Kedua, merupakan pernyataan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan sistim penganggaran pembangunan daerah. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah baik secara teknokratik, politik, partisipatif, *top down* maupun *bottom up*

Misi Ketiga, merupakan pernyataan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mewujudkan terbangunnya sistim pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan manfaat pengendalian dalam manajemen pembangunan daerah.

Sebagai motor penggerak perencanaan pembangunan, maka kualitas dan profesionalisme SDM perencanaan pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkaitan dengan kesetiaan, logika dan etika.

B. TUJUAN dan SASARAN

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan daerah	Terwujudnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJP, RPJMD, RKPD) sebagai acuan Penyusunan penganggaran	1. Jumlah RPJM yang diperdakan 2. Jumlah RKPD yang diperkadakan 3. Jumlah RPJP Review yang Diperdakan 4. Jumlah aplikasi
2	Terlaksananya penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	penelitian dan pengembangan pembangunan daerah belum optimal	1. Jumlah penelitian yang dihasilkan 2. Jumlah penelitian yang dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan
3	Terlaksananya tata ruang daerah	dokumen tata ruang belum sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.	1. Jumlah rapat BKPRD 2. Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun
4	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan makro dan mikro	pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Terlaksananya rapat-rapat pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	1. Jumlah rapat evaluasi bulanan 2. Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi triwulan 3. Jumlah rapat evaluasi tahunan dan rencana anggaran tahun berikutnya 4. Jumlah LKPJ 5. Jumlah Rakor DAK dan TP 6. Jumlah Rakor TEPPA 7. Jumlah Rakor PM2L 8. Jumlah Rakor penanggulangan Kemiskinan 9. Jumlah Rapat MDGs 10. Jumlah Rakor Desa tertinggal 11. Jumlah Rakor pengendalian Inflasi daerah 12. Jumlah Rakor Bidang Ekonomi 13. Jumlah rakor Bidang sarana prasarana 14. Jumlah Rakor Pemkesra 15. Jumlah Rapat Internal Bappeda 16. Jumlah Monev pembangunan daerah 17. Prosentase program RPJMD yang tertuang dalam RAPBD

5	Terlaksananya perencanaan sektoral antar kabupaten, propinsi dan Nasional	Terlaksananya rapat koordinasi lintas sektoral antar pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional.	1. Jumlah kerjasama antar daerah 2. Jumlah Musrenbang Kecamatan 3. Jumlah Forum BAPPEDA 4. Jumlah musrenbang Kabupaten
6	Terlaksananya koordinasi perencanaan penanaman Modal tingkat kabupaten dan provinsi	Terlaksananya koordinasi perencanaan penanaman modal	1. Rapat koordinasi penanaman modal 2. Kebijakan dalam penanaman Modal
7	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda	1. Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi 2. Jumlah pegawai yang terlatih 3. Jumlah SOP yang tersusun 4. Jumlah Anggaran

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. PROGRAM

- 1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
- 1.6. Program Pengembangan Data/Informasi
- 1.7. Program Kerjasama Pembangunan
- 1.8. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh
- 1.9. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
- 1.10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 1.11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- 1.12. Program Perencanaan Sosial Budaya
- 1.13. Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya alam
- 1.14. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2. KEGIATAN

2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- g. Penyediaan alat tulis kantor
- h. Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan
- i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- j. Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor
- k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- l. Penyediaan makanan dan minuman
- m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional
- c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
- f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/operasional
- g. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- h. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
- i. Rehabilitasi sedang/ berat Gedung Kantor

2.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Hari-hari Tertentu

2.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

- a. Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan

- 2.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan**, terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
- Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi SKPD
 - Penyusunan laporan keuangan semesteran
 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 2.6. Program Pengembangan Data/Informasi**, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
- Penyusunan & pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
- 2.7. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh**, meliputi kegiatan sebagai berikut :
- Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh
- 2.8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar**, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
- Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
- 2.9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, meliputi kegiatan sebagai berikut :
- Penyusunan Rancangan RKPD
 - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
 - Penetapan RKPD
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
 - Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 - Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2.10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**, meliputi kegiatan sebagai berikut :
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 - Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

- 2.11. Program Perencanaan Sosial Budaya,** meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya
 - b. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
- 2.12. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam,** meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah
- 2.13. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi,** meliputi kegiatan sebagai berikut :
- a. Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematis dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan.

Hasil pengukuran tingkat pencapaian kinerja, realisasi terhadap rencana tingkat capaian atau target dari masing-masing indikator kegiatan dimuat dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Sedangkan penilaian tingkat pencapaian sasaran mengacu pada masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan mempergunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Guna melihat kategori capaian kinerja dan capaian sasaran menggunakan rentang capaian sebagai berikut :

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	>100%	Sangat Berhasil
II	91% - 100%	Berhasil
III	81% - 90%	Cukup Berhasil
IV	< 81%	Kurang Berhasil

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja Tahun 2015, Bappeda Kotawaringin Barat memiliki 7 (Tujuh) sasaran dan 33 (Tiga Puluh Tiga) indikator sasaran yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Bappeda Kotawaringin Barat adalah “**Berhasil**” dengan nilai **96,31 %**.

Adapun capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat dapat duraikan sebagai berikut:

Sasaran 1:

Terwujudnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “*Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah*” diukur melalui 4 (Empat) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah RPJP Review yang diperdakan	Doc.	0	0	0
2	Jumlah RPJMD Yang diperdakan	Doc.	0	0	0
3	Jumlah RKPD yang diperkadakan	Doc.	1	1	100%
4	Jumlah Aplikasi (SIPP)	Buah	2	2	100%
Capaian Sasaran					100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “*Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah*” adalah sebesar 100 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”.

Program/ kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan anggaran sebesar Rp.779.633.500,- dan realisasi sebesar Rp 620.242.200,- atau 79.55% (terdapat efisiensi anggaran sebesar 20.45%).

Tabel 3.1.1 Perbandingan Per Tahun Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Realisasi			
			2012	2013	2014	2015
1	Jumlah RPJP Review yang diperdakan	Doc.	0	0	0	0
2	Jumlah RPJMD Yang diperdakan	Doc.	1	0	0	0
3	Jumlah RKPD yang diperkadakan	Doc.	1	1	1	1
4	Jumlah Aplikasi (SIPP)	Buah	0	0	2	2

Sasaran 2:

Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah” diukur melalui 2 (dua) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Penelitian/ Kajian yang dihasilkan	Doc	4	4	100%
2	Jumlah Penelitian/ Kajian yang dijadikan pedoman dalam Perencanaan Pembangunan	Doc	4	4	100%
Capaian Sasaran					100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “*Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah*” adalah sebesar 100 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”. Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**, dengan anggaran sebesar Rp.54.332.500,- dan realisasi sebesar Rp. 38.877.500,- atau sebesar 71.55% (terdapat efisiensi anggaran sebesar 28,45%).
- **Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**, dengan anggaran sebesar Rp. 176.200.000,- dan realisasi anggaran Rp. 175.168.000,- atau sebesar 94.41% .
- **Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh**, dengan anggaran sebesar Rp. 169.681.100,- dan realisasi anggaran Rp. 154.537.911,- atau sebesar 91.07% .

Tabel .3.2.1 Perbandingan Per Tahun Capaian Indikator Kinerja Sasaran Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Realisasi			
			2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Penelitian/ Kajian yang dihasilkan	Doc.	-	-	-	4
2.	Jumlah Penelitian/ Kajian yang dijadikan pedoman dalam Perencanaan Pembangunan	Doc.	-	-	-	4

Sasaran 3:

*Dokumen tata ruang yang sinergi dengan dokumen perencanaan
Pembangunan Daerah*

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “*Dokumen tata ruang yang sinergi dengan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah*” diukur melalui 2 (Dua) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Rapat BKPRD	Kali	4	3	75%
2.	Jumlah Dokumen Tata ruang yang tersusun	Doc	1	1	100%
Capaian Sasaran					87,5%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “*Dokumen tata ruang yang sinergi dengan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah*” adalah sebesar 87,5 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “Cukup Berhasil”.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- **Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh**, dengan anggaran sebesar Rp. 169.681.100,- dan realisasi anggaran Rp. 154.537.911,- atau sebesar 91.07%

**Tabel .3.3.1 Perbandingan Per Tahun Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dokumen tata ruang yang sinergi dengan dokumen
perencanaan Pembangunan Daerah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Realisasi			
			2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Rapat BKPRD	Kali	4	4	4	3
2.	Jumlah Dokumen Tata ruang yang tersusun	Doc	3	3	9	1

Sasaran 4

Terlaksananya Rapat–Rapat Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “*Terlaksananya Rapat –rapat Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah*” diukur melalui 3 (tiga) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Rakor Bidang Litbang	Kali	12	12	100%
2.	Jumlah Rakor Bidang Sosbud	Kali	13	12	75%
3.	Rakor Bidang Ekonomi	Kali	4	3	100%
Capaian Sasaran					91,67%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “*Terlaksananya Rapat–Rapat Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah*” adalah sebesar 91,67 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan anggaran sebesar Rp. 779.633.500,- dan realisasi anggaran Rp. 620.242.200,- atau sebesar 79.55%.
- **Program Perencanaan Sosial Budaya**, dengan anggaran sebesar Rp. 166.092.500,- dan realisasi anggaran Rp. 151.470.650,- atau sebesar 91,19%.
- **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**, dengan anggaran sebesar Rp. 500.721.510,- dan realisasi anggaran Rp. 458.093.500,- atau sebesar 91,48%.

Tabel .3.4.1 Perbandingan Per Tahun Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terlaksananya Rapat–Rapat Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Realisasi			
			2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Rakor Bidang Litbang	Kali	11	11	12	12
2.	Jumlah Rakor Bidang Sosbud	Kali	11	11	11	12
3.	Rakor Bidang Ekonomi	Kali	4	4	4	3

Sasaran 5 :
Terlaksannnya Rapat-rapat Koordinasi Lintas Sektoral Antar Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “*Terlaksannnya Rapat-rapat Koordinasi Lintas Sektoral Antar Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional.*” diukur melalui 3 (tiga) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Musrenbang Kecamatan	Kali	6	6	100%
2.	Jumlah Musrenbang Kabupaten	Kali	1	1	100%
		Capaian Sasaran			100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “*Terlaksannnya Rapat-rapat Koordinasi Lintas Sektoral Antar Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional*” adalah sebesar 100% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah:

- **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan anggaran sebesar Rp. 779.633.500,- dan realisasi anggaran Rp. 620.242.200,- atau sebesar 79,55%

Tabel .3.5.1 Perbandingan Per Tahun Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terlaksanannya Rapat-rapat Koordinasi Lintas Sektorial Antar Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Realisasi			
			2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Musrenbang Kecamatan	Kali	6	6	6	6
2.	Forum Bappeda	Kali	-	-	1	-
3.	Jumlah Musrenbang Kabupaten	Kali	1	1	1	1

Sasaran 6

Terlaksanannya Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “*Terlaksanannya Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal*” diukur melalui 2 (Dua) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Rapat Koordinasi Penanaman Modal	Kali	2	2	100%
		Capaian Sasaran			100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “*Terlaksanannya Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal*” adalah sebesar 100% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- **Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**, dengan anggaran sebesar Rp. 45.880.000,- dan realisasi anggaran Rp. 27.091.000,- atau sebesar 59,05%

Tabel .3.6.1 Perbandingan Per Tahun Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terlaksanannya Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Realisasi			
			2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Rapat Koordinasi Penanaman Modal	Kali	-	-	-	2

Sasaran 7

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bappeda

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “*Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bappeda*” diukur melalui 4 (Empat) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Sarana Prasarana yang terpenuhi	Unit	5	5	100%
2.	Jumlah Pegawai yang terlatih	Orang	15	13	86,66%
3	Jumlah SOP yang tersusun	Doc	1	1	100%
4	Jumlah Anggaran	Rp	Rp. 2.352.907.640,-	Rp. 2.195.743.083	93,32%
Capaian Sasaran					94,99%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “*Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bappeda*” adalah sebesar 94,99% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan anggaran sebesar Rp. 953.125.440,- dan realisasi anggaran Rp. 886.692.903,- atau sebesar 93,03%
- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan anggaran sebesar Rp. 1.296.482.200,- dan realisasi anggaran Rp. 1.208.669.850,- atau sebesar 93,22%
- **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan anggaran sebesar Rp. 103.300.000,- dan realisasi anggaran Rp. 100.380.330,- atau sebesar 97,17%

Tabel 3.7.1. Perbandingan Per Tahun Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bappeda

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Realisasi			
			2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Sarana Prasarana yang terpenuhi	Unit	4	5	3	5
2.	Jumlah Pegawai yang terlatih	Orang	-	-	12	13
3	Jumlah SOP yang tersusun	Doc	-	1	1	1
4	Jumlah Anggaran	Rp	Rp. 964.843.107,-	Rp. 1.972.044.795,-	Rp. 1.218.692.616,-	Rp. 2.195.743.083,-

C. REALISASI ANGGARAN

1. Penerimaan/ Pendapatan

Target penerimaan/ pendapatan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat yang di dapat dari jasa sewa gedung aula untuk tahun 2015 sebesar Rp.50.000.000.-, dapat terlampaui dengan realisasi sampai bulan Desember 2015 sebesar Rp. 68.600.910,- (137, 20 %). Penerimaan tersebut telah disetor ke Kas Daerah dalam bentuk retribusi daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Anggaran Belanja

Anggaran Belanja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 sebesar Rp. 6.839.726.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 6.386.848.826,- atau 93,38 %.

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

3.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat alokasi sebesar Rp.120.000,- realisasi sebesar Rp. 117.000,- (97,5 %)
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik alokasi sebesar Rp.273.300.000,- realisasi sebesar Rp.255.088.401,- (93,33 %)

- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional alokasi sebesar Rp.3.900.000,- realisasi sebesar Rp.2.124.100,- (54,46 %)
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan alokasi sebesar Rp. 112.889.000,- realisasi sebesar Rp.104.507.750,- (92,57%)
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor alokasi sebesar Rp.65.456.000,- realisasi sebesar Rp.60.940.000,- (93,10%)
- f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja alokasi sebesar Rp.24.280.000,- realisasi sebesar Rp.23.000.000,- (94,73%)
- g. Penyediaan alat tulis kantor alokasi sebesar Rp. 58.326.750,- realisasi sebesar Rp.57.196.400,- (98,06%)
- h. Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan alokasi sebesar Rp.24.900.000,- realisasi sebesar Rp. 24.900.000,- (100%)
- i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor alokasi sebesar Rp.7.598.050,- realisasi sebesar Rp. 7.598.050,- (100%)
- j. Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor alokasi sebesar Rp.169.910.000,- realisasi sebesar Rp.168.152.000,- (98,96%)
- k. Penyediaan makanan dan minuman alokasi sebesar Rp.22.198.000,- realisasi sebesar Rp.20.077.000,- (90,45%)
- l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah alokasi sebesar Rp.190.247.640,- realisasi sebesar Rp.162.992.202,- (85,67 %)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran disediakan anggaran sebesar Rp.953.125.440,- dengan serapan dana sebesar Rp.886.692.903,- atau 93,03% sehingga masuk kategori berhasil.

3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan Gedung Kantor alokasi sebesar Rp. 631.800.000,- dengan realisasi sebesar 625.501.000,- (99.00%)
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional alokasi sebesar Rp. 389.452.200,- realisasi sebesar Rp. 384.900.000,- (98.83%
- c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor alokasi dana sebesar 70.000.000,- dengan realisasi 69.460.000,- (99.23%)
- d. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor sebesar Rp. 35.600.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- (0 %)

- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional alokasi sebesar Rp. 156.000.000,- realisasi sebesar Rp. 115.277.250,- (73.89%)
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor alokasi sebesar Rp.13.630.000,- realisasi sebesar Rp. 13.531.600,- (99.28%)

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur disediakan anggaran sebesar Rp. 1.296.482.200,- dengan serapan dana sebesar Rp. 1.208.669.850,- atau 93,22% sehingga masuk kategori berhasil.

3.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari kegiatan :

- a. Pengadaan pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya alokasi sebesar Rp. 22.500.000,- realisasi Rp. 22.500.000,- (100 %).

Program Peningkatan Disiplin Aparatur disediakan anggaran sebesar Rp.22.500.000,- dengan serapan dana sebesar Rp. 22.500.000,- atau (100%) sehingga masuk kategori berhasil.

3.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari kegiatan :

- a. Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan alokasi sebesar Rp. 103.300.000,- realisasi sebesar Rp. 100.380.330,- (97,17%)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur disediakan anggaran sebesar Rp. 103.300.000,- dengan serapan dana sebesar Rp. 100.380.330,- atau 97,17% sehingga masuk kategori berhasil.

3.5. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan, terdiri dari kegiatan :

- a. Penyusunan laporan capaian & ikhtisar realisasi SKPD alokasi sebesar Rp.1.000.000,- realisasi sebesar Rp. 735.150,- (73.51%)
- b. Penyusunan laporan keuangan semesteran alokasi sebesar Rp. 230.000,- realisasi sebesar Rp. 200.000,- (86,96%)
- c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun alokasi sebesar Rp.1.000.000,- realisasi sebesar Rp.0,- (0%)

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan disediakan anggaran sebesar Rp. 2.230.000,- dengan serapan dana sebesar Rp. 1.176.150,- atau 52.74% sehingga masuk kategori kurang berhasil.

3.6. Program Pengembangan Data/ Informasi, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan & Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan alokasi sebesar Rp. 83.381.750,- realisasi sebesar Rp. 74.120.450,- atau (88.89%) sehingga masuk kategori cukup berhasil.

3.7. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh, meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh alokasi Rp. 169.681.100,- realisasi Rp. 154.537.911,- (91.07)

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Starategis & Cepat Tumbuh disediakan anggaran sebesar Rp. 169.681.100,- dengan serapan dana sebesar Rp. 154.537.911,- atau 91.07% sehingga masuk kategori berhasil.

3.8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.470.000,- dapat diterealisasikan sebesar Rp. 57.823.577,- atau sebesar 78.70% yang mana serapan ini masuk dalam kategori kurang berhasil.

3.9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rancangan RKPD alokasi sebesar Rp.29.636.250,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 29.636.250,- (100%)
- b. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD alokasi sebesar Rp.180.202.250,- realisasi sebesar Rp. 171.905.250,- (95.39%)
- c. Penetapan RKPD alokasi sebesar Rp.50.295.000,- realisasi sebesar Rp. 48.798.000,- (97.02%)
- d. Koordinasi penyusunan LKPI alokasi sebesar Rp.59.390.750,- realisasi sebesar Rp. 57.958.750,- (97.59%)
- e. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah alokasi sebesar Rp.359.569.250,- realisasi sebesar Rp. 311.943.950,- (86.75%)

- f. Pengembangan sistim informasi perencanaan pembangunan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.540.000,- tidak dapat direalisasi

Program Perencanaan Pembangunan Daerah disediakan anggaran sebesar Rp.779.633.500,- dengan serapan dana sebesar Rp 620.242.200,- atau 79.55% sehingga masuk kategori kurang berhasil.

3.10 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan alokasi anggaran Rp.235.487.010,- dapat terealisasi Rp. 221.452.500,-
- b. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan alokasi anggaran Rp. 210.902.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 197.763.500,- atau sebesar 93.77% dengan realisasi fisik sebesar 94.4%.
- c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi alokasi anggaran sebesar Rp.54.332.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 38.877.500,- atau sebesar 71.55%

Program Perencanaan pembangunan ekonomi disediakan dana sebesar Rp. 500.721.510,- dengan serapan dana sebesar Rp. 458.093.500,- atau (91,48%) sehingga masuk dalam kategori berhasil.

Pertumbuhan PDRB (AHK) pada Tahun 2014 sebesar 6,95% (*data BPS*) pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 6,96%. Berdasarkan kondisi tersebut diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2015 tumbuh sedikit diatas tahun 2014.

Sementara itu, laju inflasi pada 2015 mencapai 4,08%, lebih tinggi dari target sebesar 3,00%. Meskipun demikian tingkat inflasi di Kabupaten Kotawaringin Barat tergolong masih terkendali (inflasi ringan) karena masih dibawah dua digit. Komoditi pemicu inflasi pada tahun 2015 didominasi oleh komoditi bahan pangan seperti bawang merah, bawang putih, ayam potong, telur, cabe merah, cabe rawit dll. Dalam tataran riil angka inflasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal salah satunya adalah infrastruktur pendukung distribusi barang, sebab sebagian bahan konsumsi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat masih didatangkan dari luar daerah.

Angka kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan data dari BPS tercatat sebesar 5,2%, angka ini lebih tinggi dari yang ditargetkan dalam RPJMD sebesar 2,0%.

3.11 Program Perencanaan Sosial Budaya, meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial & Budaya alokasi sebesar Rp. 110.941.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 102.169.600,- (92.09%)
- b. Monitoring, evaluasi & pelaporan alokasi sebesar Rp. 55.150.750,- realisasi sebesar Rp. 49.301.050,- (89.39)

Program perencanaan sosial budaya disediakan dana sebesar Rp.166.092.500,- dengan serapan dana sebesar Rp. 151.470.650,- atau 91,19 % sehingga masuk kategori berhasil.

3.12 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, meliputi sebagai berikut:

- a. Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah alokasi sebesar Rp. 176.200.000,- realisasi sebesar Rp. 175.168.000,- (94.41%)

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam disediakan anggaran sebesar Rp. 176.200.000,- dengan serapan dana Rp. 175.168.000,- atau 94.41% sehingga masuk kategori berhasil.

3.13 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal alokasi Rp. 45.880.000,- realisasi Rp.27.091.000,- (59,05%)

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi disediakan anggaran sebesar Rp. 45.880.000,- dengan serapan dana Rp. 27.091.000,- atau 59,05% sehingga masuk kategori kurang berhasil. Sementara itu nilai PMDN tahun 2015 melampaui nilai yang ditargetkan dari RPJMD sebesar 271,84% dari target awal Rp. 3.500.000.000.000,- realisasinya mencapai Rp. 9.514.513.717.129,- namun hal ini tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah investor bersekalanya nasional yang hanya terealisasi sebesar 41 perusahaan dari target semula 67 perusahaan. Sementara itu nilai PMA turun dari angka yang ditargetkan sebesar US\$ 408.317.994,79 dari target awal sebesar US\$. 650.000.000 atau 62,82 %.

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai kewajiban dari instansi yang berbasis pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun, baik mengenai keberhasilan/kegagalan dan strategi pemecahan masalah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Dilihat dari capaian keuangan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat secara garis besar per 31 Desember 2015 dapat terealisasi sebesar 93,38% dengan kategori berhasil

2. Kegagalan/Hambatan/Permasalahan

- a. Masih ada kegiatan kegiatan yang capaian keuangannya kurang dari 81%
- b. Tidak tercapainya taget realisasi per triwulan.
- c. Kurangnya staf pelaksana di Bappeda.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

1. Pemberdayaan aparatur Bappeda dengan mengikuti kegiatan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan daerah dan penganggaran
2. Peningkatan kapasitas aparatur Bappeda dengan mengikuti diklat dan bimtek terkait perencanaan baik perencanaan secara umum maupun substantif
3. Perlunya pematangan perencanaan dan penyusunan anggaran tiap kegiatan.
4. Melakukan permohonan pengusulan penambahan staff kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat, yang disusun sebagai pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2015.

Pangkalan Bun, Januari 2016

**Kepala Bappeda
Kabupaten Kotawaringin Barat**

**Drs. WAHYUDI, M. Si
NIP. 19630923 199003 1 010
Pembina Utama Muda**